

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SEKTOR UMKM: PERKEMBANGAN DAN STRATEGI KE DEPAN

Oleh: Dr. Perry Warjiyo, MSc.¹

Pendahuluan

Perkembangan sektor UMKM selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor UMKM semakin nampak khususnya sejak krisis tahun 1997. Di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lambat, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan, khususnya industri perbankan, telah pula mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan dan porsi yang lebih besar untuk UMKM. Perkembangan inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional.

Ke depan, momentum ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pertumbuhan dan peran sektor UMKM di dalam perekonomian nasional harus terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi tetapi juga kemampuannya yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja dan mengatasi masalah kemiskinan. Apalagi dengan komitmen dan strategi yang lebih kuat dari Pemerintah yang baru, iklim investasi dan keagairahan usaha dalam

perekonomian nasional, termasuk sektor UMKM, diyakini akan jauh lebih baik. Optimisme prospek perkembangan sektor UMKM ke depan seperti ini jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan, khususnya dari industri perbankan, untuk mendukungnya.

Makalah ini mencoba mengemukakan beberapa pokok pemikiran mengenai perkembangan selama ini dan strategi pembiayaan sektor UMKM ke depan. Pertama-tama akan diulas secara ringkas perkembangan pembiayaan sektor UMKM selama ini, dengan menekankan sejumlah perubahan struktural dalam ekonomi dan keuangan di Indonesia yang menjadi pendorongnya. Selanjutnya disampaikan prospek pembiayaan sektor UMKM, yang diikuti dengan beberapa agenda penting untuk penguatan kebijakan pengembangan sektor UMKM ke depan. Pemaparannya lebih ditekankan pada pemikiran konseptual strategis pada arah kebijakan pembiayaan sektor UMKM ke depan, dengan merujuk beberapa pemikiran dari sejumlah studi yang dipandang relevan.

Perkembangan Pembiayaan Sektor UMKM

Analisis mengenai kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia saat ini telah banyak disampaikan baik dalam laporan resmi berbagai lembaga publik maupun dari para ekonom.² Secara umum dapat

¹ Penulis adalah Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia. Pendapat dalam makalah ini merupakan pendapat pribadi penulis, dan tidak selalu mencerminkan pendapat Bank Indonesia.

dikatakan bahwa stabilitas ekonomi makro Indonesia hingga kini dapat terjaga secara baik, seperti tercermin pada defisit fiskal yang terkendali, laju inflasi yang relatif rendah, maupun nilai tukar rupiah yang stabil. Akan tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih moderat (Tabel 1). Lebih dari itu, sumber utama pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi sementara pertumbuhan investasi dan ekspor neto masih relatif rendah. Dengan tingkat pertumbuhan seperti ini, kemampuan ekonomi Indonesia untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan juga terbatas.

Yang perlu ditekankan dalam anatomi ekonomi Indonesia saat ini adalah perubahan struktural ekonomi yang tengah berlangsung dan implikasinya bagi penguatan kebijakan publik yang diperlukan ke depan. Dalam kaitan ini, perubahan struktural ekonomi setidaknya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu di sektor riil dan di sektor keuangan. Di sektor riil, perubahan struktural yang terjadi berkaitan erat dengan beratnya permasalahan yang dihadapi sektor korporat sejak krisis tahun 1997. Sebagian besar perusahaan Indonesia, yang pada periode sebelum krisis merupakan komponen terbesar dari struktur ekonomi, hingga kini masih

Tabel 1: Indikator Ekonomi Makro 2000-2004

	INDIKATOR	2000	2001	2002	2003	2004**
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,9	3,5	3,7	4,1	4,8
	- Konsumsi (%)	2,0	3,9	4,7	4,6	5,7
	- Investasi (%)	16,7	6,5	0,2	1,4	8,5
	- Ekspor (%)	26,5	2,9	-0,6	4,0	3,8
	- Impor (%)	25,9	8,2	-5,0	2,0	8,3
2	Fiscal Balance (% of PDB)	-1,7	-3,7	-2,5	-1,8	-1,5
3	Inflasi (%)	9,35	12,55	10,03	5,06	6,27
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	8.403	10.256	9.316	8.572	8.900
5	Cadangan Devisa (Milyar USD)	29,4	28,0	32,0	36,2	34,8
6	Moneter dan Perbankan					
	a. Dana masyarakat (Rp. t)					
	b. - Posisi Kredit (Rp.t)	269,0	307,6	365,4	437,9	505,2
	- Tambahan (Rp.t)	43,9	38,6	57,8	72,5	101,7
	(%, yoy)	19,5	14,3	18,8	19,8	25,2
	c. Suku Bunga SBI (%)	14,5	17,6	12,9	8,3	7,4
	Suku bunga Dana (%)	11,2	14,5	12,8	6,6	6,3
	Sk. bunga kr. modal kerja(%)	18,4	19,2	18,2	15,1	13,8

Sumber: Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Keuangan.

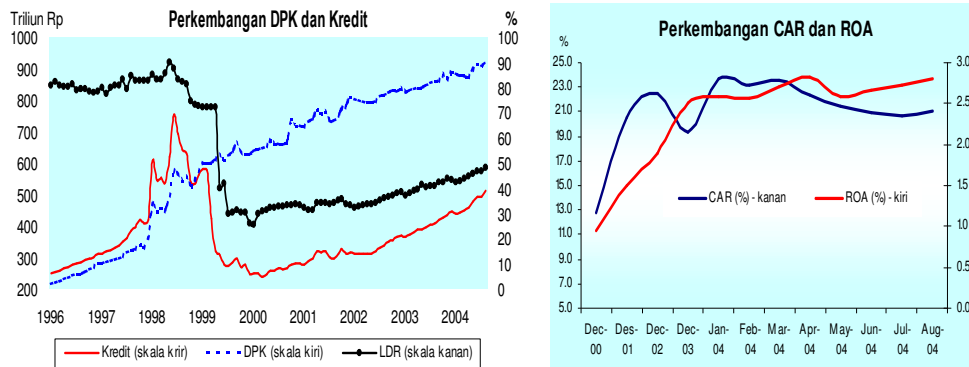
² Bank Indonesia secara periodik menerbitkan laporan tahunan, triwulanan, maupun bulanan yang berisi evaluasi terhadap perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, dan sistem pembayaran sebagai bagian dari laporan pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 1999.

menghadapi permasalahan hutang luar negeri maupun restrukturisasi kredit kepada perbankan dalam negeri. Bahkan sebagian diantaranya juga masih harus menyelesaikan permasalahan jaminan aset terkait dengan bank-bank dimana pemilik perusahaan besar tersebut juga menjadi pemilik atau pengurusnya.

Kompleksitas permasalahan yang masih dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar (korporat) seperti ini telah membawa beberapa perubahan struktural dalam ekonomi Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- (i) Struktur ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan dengan peran sektor UMKM yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelum krisis. Hal ini mengingat sementara sektor korporat masih dalam proses restrukturisasi yang berjalan lambat, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus mengalami peningkatan.
- (ii) Permasalahan di perusahaan besar di sektor industri manufaktur telah menimbulkan terjadinya proses deindustrialisasi dalam struktur ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, dari 30 kelompok komoditi ekspor nonmigas Indonesia sejak krisis hanya 10 kelompok komoditi yang tumbuh tinggi (di atas 10%) dan 8 diantaranya adalah komoditi primer (pertanian dan pertambangan).
- (iii) Beratnya permasalahan sektor riil antara lain tercermin pada masih rendahnya pemanfaatan kapasitas produksi yang secara rata-rata tidak lebih dari 60% kapasitas terpasang. Kondisi sektor riil seperti ini telah menyebabkan meningkatnya *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang sebelum krisis berada pada kisaran angka 3 kini menjadi lebih dari 5.
- (iv) Permasalahan struktural di sektor riil juga menyebabkan masih tingginya resiko kredit dari sisi perbankan. Tingginya resiko kredit pada sektor korporat lebih terkait dengan proses restrukturisasi yang berjalan lambat, sementara resiko kredit untuk sektor UMKM terutama didorong oleh kemampuan kewirausahaan dan belum berjalannya lembaga penjaminan kredit khususnya di daerah.

Sementara di sektor keuangan, perubahan struktural yang terjadi terkait dengan proses restrukturisasi khususnya di sektor perbankan. Seperti diketahui, untuk mengatasi krisis perbankan, Pemerintah telah menempuh kebijakan menyeluruh untuk merestrukturisasi dan sekaligus meningkatkan ketahanan industri perbankan. Sejumlah kebijakan yang ditempuh mencakup: program penjaminan Pemerintah, program rekapitalisasi, maupun program restrukturisasi kredit perbankan. Dengan berbagai kebijakan dimaksud, industri perbankan sejak lima tahun terakhir terus mengalami perbaikan, baik dari sisi pendanaan, perkreditan, permodalan, maupun profitabilitas. Dengan program penjaminan Pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan telah pulih kembali sehingga simpanan masyarakat (Dana Pihak Ketiga -DPK) terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp921,4 triliun pada Agustus 2004 (Grafik 1). Sementara program rekapitalisasi Pemerintah telah mampu mengatasi kondisi permodalan bank-bank sehingga memenuhi standar internasional, seperti tercermin pada -Capital Adequacy Ratio (CAR) yang mencapai 20,7% pada Agustus 2004. Demikian pula profitabilitas perbankan terus membaik seperti tercermin pada Return on Asset (ROA) yang mencapai 2,80% pada Agustus 2004 (Grafik 1).



Grafik 1: Kinerja Bank-Bank Umum

Tabel 2: Perkembangan Kredit Perbankan Menurut Penggunaan

	2001	2002	2003	2004 (Agt)
Kredit Modal Kerja				
▪ Posisi (Rp triliun)	175,7	202,7	231,5	261,2
▪ Pertumbuhan (% tahunan)	7,4	15,4	14,2	19,0
▪ Pangsa (% total kredit)	57,1	55,4	52,9	51,7
Kredit Investasi				
▪ Posisi (Rp triliun)	73,5	82,9	94,3	112,7
▪ Pertumbuhan (% tahunan)	12,5	12,8	13,7	26,4
▪ Pangsa (% total kredit)	23,9	22,7	21,5	22,3
Kredit Konsumsi				
▪ Posisi (Rp triliun)	58,4	79,8	112,1	131,3
▪ Pertumbuhan (% tahunan)	45,7	36,5	40,4	38,3
▪ Pangsa (% total kredit)	19,0	21,8	25,5	26,0
Total outstanding kredit				
▪ Posisi (Rp triliun)	307,6	365,4	437,9	505,2
▪ Pertumbuhan (% tahunan)	14,3	18,8	19,8	25,2

Sumber: Bank Indonesia.

Demikian pula, proses intermediasi perbankan juga telah banyak mengalami perbaikan. Peningkatan dana masyarakat, perbaikan kondisi internal perbankan, dan mulai bergairahnya kegiatan ekonomi telah mampu meningkatkan penyaluran kredit oleh perbankan. Dalam lima tahun terakhir outstanding kredit perbankan meningkat rata-rata sekitar 17,5% per tahun sehingga mencapai Rp. 505,2 triliun pada Agustus

2004 (Tabel 2). Dari sisi penggunaannya, kredit perbankan tersebut disalurkan untuk kredit modal kerja sebesar 51,7%, kredit konsumsi 26,0%, dan kredit investasi sebesar 22,3% dari outstanding kredit Agustus 2004. Komposisi kredit seperti ini tidak mengherankan karena karakteristik kegiatan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada konsumsi seperti dikemukakan di atas.

Yang menggembirakan adalah besarnya kredit yang disalurkan kepada sektor UMKM yang mencapai Rp210,9 triliun pada akhir tahun 2003 dan meningkat menjadi Rp262,6 triliun pada bulan September tahun 2004, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 29,5% (Tabel 3). Dengan demikian, sekitar separuh dari total kredit perbankan disalurkan kepada sektor UMKM, yaitu mencapai 48% dan 52% masing-masing pada akhir tahun 2003 dan September tahun 2004. Yang juga menggembirakan adalah semakin sehatnya struktur penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM tersebut, khususnya apabila dilihat dari besarnya plafon kredit yang diberikan. Untuk posisi kredit UMKM pada bulan September 2004, sebesar 46,3% dalam bentuk kredit mikro dengan plafon sampai dengan Rp 50 juta, sementara kredit kecil (plafon dari Rp 50 juta s.d. Rp 500 juta) dan kredit menengah (plafon Rp500 juta s.d. Rp 5 miliar) masing-masing mencapai 25,2% dan 28,6%. Perkembangan ini

menunjukkan semakin besar dan meningkatnya peran sektor UMKM dalam perekonomian, tidak saja yang mikro tetapi juga yang kecil dan menengah.

Apabila dilihat dari penggunaannya, pola kredit kepada sektor UMKM tidak jauh berbeda dengan kredit perbankan pada umumnya, yaitu sebagian besar kredit UMKM diberikan untuk kredit modal kerja (41,8%) dan kredit konsumsi (47,9%). Kredit UMKM untuk investasi bulan September 2004 baru mencapai 10,9%. Pola pembiayaan UMKM seperti ini juga sesuai dengan karakteristik usaha UMKM yang lebih banyak membutuhkan kredit modal kerja daripada dalam bentuk investasi yang jumlahnya relatif besar. Sementara dilihat dari sektor ekonomi, kredit kepada UMKM umumnya diberikan untuk sektor-sektor: perdagangan, jasa dunia usaha, perindustrian, dan konstruksi. Pola kredit per sektor ini juga menggambarkan kondisi usaha sektor UMKM yang pada umumnya bergerak pada sektor-sektor yang disebutkan tadi.

Tabel 3: Perkembangan Kredit UMKM Menurut Plafon dan Jenis Penggunaan

(Triliun Rp)

	2001	2002	2003	2004 (Sept)		
				Posisi	Growth	Pangsa
Menurut Plafon:						
▪ Kredit Mikro (s.d. Rp50 juta)	59,5	83,2	101,3	121,5	26,0%	46,3%
▪ Kredit Kecil (Rp50 juta-500 juta)	28,5	39,4	50,3	66,1	33,4%	25,2%
▪ Kredit Menengah (Rp500 juta-5 M)	31,8	45,0	61,7	75,0	32,0%	28,6%
Menurut Penggunaan:						
▪ Kredit Modal Kerja	50,3	73,7	90,0	104,8	21,9%	39,9%
▪ Kredit Investasi	14,6	17,3	22,3	27,8	31,3%	10,6%
▪ Kredit Konsumsi	54,9	76,6	101,0	130,1	36,0%	49,5%
Total Kredit UMKM						
▪ Posisi (Rp triliun)	119,7	167,7	213,3	262,6	29,5%	100%
▪ Growth (% tahunan)		40,1	27,1	29,5	—	—

Sumber: Bank Indonesia.

Dari perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa penyediaan kredit oleh perbankan untuk mendukung pengembangan sektor UMKM telah demikian besar. Hal ini sekaligus menunjukkan ketidakbenaran sinyalemen bahwa dukungan perbankan terhadap sektor UMKM masih rendah. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana peran kredit UMKM dari perbankan yang tidak saja tumbuh lebih cepat tetapi juga telah mencakup separuh dari total kredit perbankan. Analisis tersebut juga sejalan dengan beberapa penelitian mengenai fenomena *credit crunch* di Indonesia menunjukkan faktor-faktor baik dari sisi perbankan maupun sisi debitur. Untuk periode hingga akhir 2000, fenomena yang ada waktu itu memang menunjukkan bahwa masih melambatnya kredit perbankan lebih disebabkan oleh faktor-faktor penawaran seperti permodalan bank, meningkatnya *Non-performing Loans* (NPLs), tingginya resiko kredit dunia usaha, dan kurangnya informasi mengenai debitur potensial.³ Akan tetapi dalam studi yang terkini dengan data hingga Juni 2004, perkembangannya telah banyak berubah dan menunjukkan bahwa fenomena *credit crunch* sudah tidak terjadi lagi di Indonesia.⁴ Kondisi pasar kredit telah normal kembali dengan penawaran kredit bank yang mampu memenuhi permintaan kredit dari debitur. Lebih dari itu, konvergensi kesenjangan penawaran dan permintaan kredit, rendahnya LDR, dan tingginya *undisbursed loans* menunjukkan bahwa permintaan kredit yang seharusnya perlu didorong untuk

meningkatkan kredit perbankan, bukan dari sisi penawaran kredit.

Uraian di atas menunjukkan bagaimana eratnya peningkatan peran dan pembiayaan sektor UMKM yang sangat menggembirakan selama ini dengan perubahan struktural dalam sektor ekonomi riil dan sektor keuangan di Indonesia. Keterkaitan itu dapat dikarakteristikan sebagai berikut. *Pertama*, permasalahan di sektor riil, khususnya sektor perusahaan besar (korporat) dan BUMN, sementara permintaan barang dan jasa dari masyarakat yang terus mengalami peningkatan, telah memberikan peluang bagi peningkatan sektor UMKM dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sesuai dengan karakteristiknya, sektor-sektor ekonomi yang banyak digeluti oleh UMKM antara lain perdagangan, jasa dunia usaha, perindustrian, konstruksi, dan sektor ekonomi lainnya yang umumnya bersifat informal. Dengan peningkatan kegiatan ekonomi seperti ini, sektor UMKM mampu meningkatkan peran dan sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia selama ini.

Kedua, berbagai langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia selama ini telah mampu memperbaiki kondisi internal perbankan, baik dari sisi permodalan, dana masyarakat, kredit, maupun profitabilitas. Dengan perbaikan ini, bank-bank telah semakin bergairah dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha dan masyarakat. Lebih dari itu, dengan peningkatan kegiatan ekonomi di sektor UMKM seperti di atas, penyaluran kredit

³ Baca Jуда Agung dkk (2001), *Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis*, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.

⁴ Baca Boedi Armanto (2004), "Fenomena Credit Crunch dalam Pasar Kredit Yang Disequilibrium dan Implikasinya terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan", Disertasi Doktor, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

kepada sektor UMKM juga meningkat pesat, bahkan melebihi peningkatan kredit pada umumnya. Dewasa ini, kredit UMKM mencakup separuh dari total kredit perbankan. Sesuai dengan pola kegiatan ekonomi yang tengah berlangsung selama ini, sebagian besar kredit kepada UMKM diberikan dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit konsumsi untuk sektor-sektor ekonomi seperti yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, dukungan perbankan kepada pengembangan sektor UMKM telah demikian besar.

Prospek dan Strategi Pembiayaan Sektor UMKM

Pengamatan terhadap perkembangan yang terjadi selama proses pemilu serta visi dan berbagai program yang dikemukakan oleh Pemerintahan baru memberikan optimisme bagi peningkatan kegiatan ekonomi ke depan, termasuk bagi pengembangan sektor UMKM. Bahkan diperkirakan sektor UMKM akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan akan semakin berperan ke depan. Optimisme ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, iklim investasi dan iklim usaha yang selama ini menjadi kendala utama bagi peningkatan kegiatan ekonomi diperkirakan akan jauh lebih baik ke depan. Pemerintah yang baru nampak demikian serius untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi faktor penyebab buruknya iklim investasi selama ini, seperti masalah KKN, penegakkan dan kepastian hukum, masalah pertahanan dan keamanan, perpajakan maupun ketenagakerjaan, serta pelayanan birokrasi baik di pemerintah pusat maupun daerah. Respon dari investor, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri, nampak demikian kuat sehingga diperkirakan mereka akan semakin tertarik untuk menanamkan

investasinya di Indonesia dan tidak akan bersikap wait and see seperti selama ini. Perbaikan iklim investasi ini jelas akan semakin meningkatkan kegiatan ekonomi ke depan, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 7% pada tahun 2008-2009.

Kedua, proses pemulihan sektor korporat (perusahaan besar) diperkirakan masih akan memerlukan waktu untuk bisa benar-benar pulih seperti sebelum krisis. Hal ini tidak saja kompleksnya permasalahan restrukturisasi yang mereka hadapi, tetapi juga sebagian diantaranya berkaitan dengan permasalahan hukum. Hutang luar negeri perusahaan-perusahaan tersebut masih besar dan sebagian diantaranya masih dalam proses restrukturisasi atau penjadwalan kembali dengan kreditur luar negeri. Demikian pula, restrukturisasi kredit kepada korporat yang selama ini dilakukan oleh BPPN dan kemudian telah dilimpahkan ke sejumlah bank juga masih memerlukan waktu untuk dapat dikatakan sehat. Permasalahan-permasalahan seperti ini yang diperkirakan akan menjadi kendala bagi perusahaan besar untuk dapat meningkat secara pesat. Dalam kondisi demikian, dan dengan program pengembangan yang lebih diperkuat, optimisme untuk peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional ke depan sangatlah beralasan.

Ketiga, dukungan pembiayaan dari sektor keuangan, khususnya industri perbankan, diperkirakan juga akan tetap kuat dan meningkat. Dengan permasalahan restukturisasi perusahaan besar seperti di atas, diperkirakan penyaluran kredit perbankan dalam bentuk kredit korporasi belum akan meningkat pesat. Dari sisi perbankan, sektor korporat masih menanggung resiko kredit macet yang lebih besar. Terlebih lagi, sejak terjadinya

krisis, perbankan Indonesia semakin bersikap hati-hati (pruden) dalam kegiatan operasinya, termasuk dalam penyaluran kredit. Dengan demikian, minat dan "apetide" perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM akan tetap besar di samping karakteristik usahanya yang dapat memberikan hasil (return) yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan usaha korporasi. Lebih dari itu, bank-bank selama ini telah semakin banyak yang menggeluti strategi ritel dengan porsi penyaluran kredit kepada sektor UMKM yang semakin besar. Dengan kata lain, kemampuan strategi, teknik manajerial ataupun sumber daya manusia perbankan dalam penyaluran kredit kepada sektor UMKM telah banyak mengalami peningkatan. Berbagai faktor inilah yang melandasi optimisme akan semakin besarnya pembiayaan kredit kepada sektor UMKM.

Uraian di atas menunjukkan bagaimana optimisme akan prospek pengembangan sektor UMKM dan potensi pembiayaan kredit dari perbankan ke depan. Tentu saja optimisme seperti ini mengharuskan dirumuskan dan diimplementasikannya strategi dan program yang jelas serta terarah untuk mencapainya, dengan dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, maupun dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan. Arah kebijakan umum telah jelas, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan peran sektor UMKM, sehingga mampu menjadi pilar utama dalam perekonomian nasional. Dalam kaitan, strategi peningkatan

pembiayaan kepada sektor UMKM ke depan perlu mencakup empat aspek pokok yaitu: (i) Strategi untuk penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi sektor UMKM, (ii) Strategi untuk penguatan kemampuan kewirausahaan dan kegiatan usaha sektor UMKM, (iii) Strategi penguatan sektor keuangan khususnya perbankan dalam pembiayaan kepada sektor UMKM, dan (iv) Strategi untuk pengembangan berbagai perangkat penunjang (infrastructure) bagi peningkatan pembiayaan sektor UMKM.

Strategi pertama memerlukan penguatan komitmen dan strategi yang menyeluruh serta jelas dari sisi Pemerintah baru untuk pengembangan sektor UMKM ke depan. Strategi ini penting dan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang sedang dirumuskan Pemerintah.⁵ Di dalamnya harus memuat beberapa aspek penting strategi UMKM secara nasional ke depan, seperti: visi UMKM 5-10 tahun ke depan, sasaran yang akan dicapai tahun 2009, dan berbagai kebijakan dan program untuk mencapai sasaran tersebut. Lebih dari itu, strategi nasional untuk pengembangan UMKM seperti ini diperlukan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi integrasi dan koordinasi program-program yang selama ini terkesan tersebar dan kurang terpadu di berbagai lembaga, baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, maupun Pemerintah Daerah. Karena itu, peran dari Kementerian Koperasi dan UMKM menjadi semakin penting untuk mampu memberikan masukan dalam strategi

⁵ Strategi pembangunan nasional saat ini sedang dirumuskan oleh Pemerintah c.q. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. Menurut rencana, strategi pembangunan nasional tersebut akan diajukan sebagai Rancangan Undang-undang kepada DPR dalam waktu dekat sehingga diharapkan awal tahun 2005 telah dapat diumumkan kepada masyarakat.

nasional tersebut dan sekaligus bertindak sebagai koordinator dan dirigen untuk penguatan implementasinya ke depan.

Strategi kedua ini, penting untuk semakin meningkatkan kemampuan usaha dan daya saing sektor UMKM di berbagai sektor dan kegiatan ekonomi. Seperti dikemukakan di atas, pembinaan kepada sektor UMKM yang dilakukan selama ini oleh sejumlah instansi Pemerintah perlu lebih diintegrasikan dan dikoordinasikan ke depan. Dari pengalaman selama ini, strategi pengembangan sektor UMKM yang memperhatikan kaidah dan bekerjanya mekanisme pasar mampu meningkatkan ketangguhan sektor UMKM dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dengan demikian, yang diperlukan dalam strategi ini terutama adalah: (i) penguatan iklim investasi dan akses usaha sektor UMKM dalam berbagai sektor ekonomi, dan (ii) peningkatan kemampuan kewirausahaan sektor UMKM seperti dalam hal manajemen, inovasi produk, akses pasar, maupun investasi. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kemampuan sektor UMKM dalam memenuhi persyaratan perkreditan yang umumnya dimintakan oleh kalangan perbankan seperti penyusunan kelayakan proyek, prosedur permohonan kredit, ataupun persyaratan-persyaratan lainnya.

Strategi ketiga memerlukan penguatan lebih lanjut sektor keuangan, baik dari kelembagaan, produk, maupun pasar keuangan, agar mampu menyediakan pembiayaan kepada sektor UMKM yang lebih besar dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Seperti dikemukakan di atas,

minat perbankan untuk penyaluran kredit kepada sektor UMKM akan tetap besar, dan kemampuan teknis perbankan dalam hal ini telah jauh lebih maju dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan terus mendukung upaya-upaya Pemerintah maupun perbankan dalam pengembangan sektor UMKM. Hal ini dilakukan antara lain dengan penyampaian pemikiran untuk penguatan strategi dan implementasi program pengembangan UMKM yang dilakukan Pemerintah maupun peningkatan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit kepada sektor UMKM seperti skim-skim kredit, identifikasi sektor maupun produk yang layak diberikan kredit, dan peningkatan hubungan antara bank umum dengan BPR ataupun hubungan antara bank dengan nasabah UMKM. Berbagai upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan kepada sektor UMKM tersebut merupakan bagian integral dari program-program untuk pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan seperti telah dirumuskan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API).⁶

Yang perlu ditekankan pula di sini adalah perlunya pengembangan berbagai lembaga, produk dan pasar keuangan untuk pembiayaan sektor UMKM. Dari sisi kelembagaan, selain perbankan, peningkatan peran lembaga-lembaga keuangan lainnya sangat diperlukan. Salah satu contohnya adalah perlunya pengembangan lembaga pembiayaan, khususnya multifinance, yang mampu menyediakan pembiayaan modal bagi sektor usaha kecil dan menengah.⁷ Dari sisi produk, penciptaan surat-surat

⁶ Baca Bank Indonesia (2003), *Arsitektur Perbankan Indonesia: Visi Perbankan Indonesia ke Depan*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia.

⁷ Dari sisi operasinya, lembaga multifinance cocok untuk pengembangan sektor UMKM karena kemampuannya yang tidak saja dalam penyediaan modal tetapi juga dalam hal manajemen. Dalam banyak hal, pengembangan bank syariah juga mengacu mekanisme seperti ini dengan pula bagi hasil baik dalam bentuk perusahaan patungan (musyarakah) maupun penyertaan penuh (mudharabah).

berharga yang diterbitkan oleh perusahaan menengah juga diperlukan untuk diversifikasi pembiayaan sektor UMKM selain berupa kredit perbankan. Yang tak kalah pentingnya adalah perlunya meningkatkan kemampuan dan akses perusahaan khususnya berskala menengah untuk mampu melakukan emisi baik berupa saham maupun obligasi sebagai alternatif pembiayaan dari sisi pasar modal.⁸ Pengembangan lembaga, produk, maupun pasar keuangan seperti ini diperkirakan akan menjadi kecenderungan ke depan dalam pembiayaan kepada sektor UMKM selain dari kredit perbankan.

Strategi keempat jelas pula penting karena sangat besar peranannya dalam pengembangan sektor UMKM yang berbasis mekanisme pasar dan peningkatan peran swasta. Kelemahan dalam pengembangan infrastruktur seperti ini juga menjadi salah satu kendala selama ini. Fungsi dari lembaga penunjang ini pada dasarnya ada dua, yaitu untuk mengatasi permasalahan keterbatasan informasi dan besarnya resiko usaha sektor UMKM. Dalam konteks akses informasi, ke depan semakin banyak diperlukan lembaga-lembaga perantara untuk mendorong peningkatan usaha UMKM dalam berbagai aspeknya. Sebagai contoh, untuk meningkatkan akses pasar berbagai produk UMKM baik di dalam negeri maupun untuk ekspor, suatu lembaga perantara pemasaran sangatlah penting. Pembentukan *Credit*

Bureau oleh Bank Indonesia juga dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan informasi ini, karena lembaga tersebut telah mampu meningkatkan akses bagi kalangan perbankan untuk mendapatkan informasi bagi calon-calon debitur yang akan dibiayai. Demikian pula, lembaga-lembaga pengkajian yang mampu mengidentifikasi berbagai sektor maupun produk sektor UMKM yang feasible untuk dibiayai jelas akan semakin dibutuhkan oleh perbankan maupun lembaga keuangan yang lain.

Sementara dalam konteks resiko usaha sektor UMKM, ke depan kebutuhan untuk berbagai lembaga penjamin resiko sangat diperlukan. Seperti diketahui, besarnya resiko usaha merupakan salah satu faktor pokok yang dihadapi dalam pengembangan sektor UMKM. Resiko-resiko tersebut baik yang berkaitan dengan ketidakpastian usaha, keterbatasan kewirausahaan, maupun resiko kredit macet. Berbagai langkah yang dijelaskan di atas, apabila berhasil, jelas akan mengurangi berbagai ketidakpastian yang menjadi penyebab besarnya resiko usaha di sektor UMKM tersebut. Dalam kaitannya dengan resiko kredit perbankan, sejumlah lembaga penjamin kredit perbankan untuk skala besar memang telah didirikan oleh swasta. Untuk penjaminan kredit kepada sektor UMKM, sejumlah pemerintah daerah di beberapa daerah juga telah mendirikan lembaga penjaminan kredit daerah. Dalam hal ini,

⁸ *Sebelum krisis, di Indonesia pernah berdiri Bursa Paralel Indonesia (BPI) yang memungkinkan perusahaan-perusahaan menengah menerbitkan saham atau obligasi di pasar modal. Pada perkembangan selanjutnya BPI dimergers dengan Bursa Efek Surabaya (BES).*

Pengembangan pasar modal yang memungkinkan bagi emisi saham atau obligasi dari perusahaan-perusahaan kecil menengah seperti ini perlu dipikirkan ke depan.

Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

Bank Indonesia bersama-sama dengan sejumlah pemerintah daerah telah mengembangkan lembaga penjaminan kredit daerah tersebut agar dapat diperluas ke daerah-daerah lain. Dengan pengembangan lembaga-lembaga penjaminan kredit UMKM seperti ini diharapkan pembiayaan sektor keuangan baik dalam bentuk kredit perbankan maupun bentuk-bentuk pembiayaan lain kepada sektor UMKM akan meningkat.

Penutup

Uraian pada bagian-bagian di atas menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan kepada sektor UMKM selama ini sungguh menggembirakan dan diperkirakan akan semakin meningkat ke depan. Optimisme ini tidak saja dilandasi oleh kinerja pembiayaan kepada sektor UMKM selama ini, tetapi

juga prospek peningkatan kegiatan perekonomian nasional dan potensi yang terbuka luas untuk sektor UMKM ke depan. Dari sisi perbankan, penyaluran kredit kepada sektor UMKM yang selama ini meningkat pesat dan telah mencakup lebih dari separuh dari total kredit perbankan, diperkirakan juga akan terus meningkat. Tentu saja keberhasilan pengembangan sektor UMKM memerlukan penguatan strategi ke depan, khususnya dalam hal penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kewirausahaan, penguatan pembiayaan, maupun pengembangan berbagai lembaga penunjang untuk sektor UMKM. Perkembangan dan prospek seperti ini diharapkan akan mendukung peningkatan peran penting sektor UMKM dalam perekonomian nasional.